

DAMPAK IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA DI PROVINSI DI INDONESIA

Hadi Sasana

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Email : hadisasanasmg@yahoo.com

Abstrak

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan untuk meningkatkan kesetaraan perkembangan lokal, sesuai dengan motivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus mereka.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di provinsi-provinsi di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua, kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja.

Abstract

Fiscal decentralization and implementation of local autonomy enhance authority of local governments to increase their income and to conduct allocative function in setting priority of local development. Fiscal decentralization and implementation of local autonomy are expected to improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality.

This study is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, and inflation in the provinces in Indonesia. Data analysis is conducted using multiple regression.

The results of this study indicate that, fiscal decentralization has a positive relationship but statistically were not significant effect on economic growth and inflation. Second, employment significant positive effect on economic growth.

Keywords: *Fiscal decentralization, economic growth, inflation, employment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerintah berperan penting dalam mempengaruhi perekonomian. Instrumen fiskal tersebut berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran (Mankew, 2003). Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diterapkan Indonesia merupakan tantangan baru dalam manajemen ekonomi makro Indonesia. Beberapa negara, seperti India, Brasil, Rusia, dan Cina, pernah menghadapi masalah stabilitas ekonomi makro yang pelik dan berkepanjangan akibat kurang tepat dalam mengelola pelaksanaan desentralisasi fiskal. Salah satu akar permasalahan ini adalah perbedaan orientasi kebijakan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Strauss *et al.*, 2002).

Kajian implementasi desentralisasi fiskal oleh Mahi (2001), Brodjonegoro (2002), Pujiati (2007) menemukan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi

secara signifikan. Sementara itu penelitian Sasana (2005) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi menciptakan kesenjangan ekonomi regional antar daerah. Penelitian Waluyo (2007) memperkuat temuan sebelumnya, bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.

Desentralisasi fiskal berpotensi mengakibatkan instabilitas makro ekonomi. Studi empiris di Amerika Latin oleh Vazquez dan McNab (2006) membuktikan bahwa desentralisasi akan menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi yang kemudian akan berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi lokal. Studi Malik (2006) di Pakistan menemukan hasil yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makro ekonomi.

Berdasarkan fakta empiris selama tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi makro di Indonesia. Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap kondisi sosial ekonomi selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin, Pengangguran, Inflasi, Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Transfer ke Daerah (trilyun Rp)	Pertb. Ekonomi (%)	Penganggur (%)	Inflasi (%)
2008	292,63	6,0	,39	11,10
2009	296,85	4,6	8,96	2,80
2010	316,71	6,2	8,12	6,96
2011	347,25	6,5	7,70	3,79
2012	399,97	6,2	7,24	4,30

Sumber : BPS, Depkeu, dan Tranparency International, beberapa tahun.

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berkorelasi erat dengan instabilitas makro ekonomi (inflasi), dan pengangguran di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan data empiris terkait, paling tidak ada dua hal penting yang melatarbelakangi penelitian ini. *Pertama*, desentralisasi fiskal yang ditengarai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan ternyata berdampak pada stabilitas makro ekonomi (inflasi) *Kedua*, adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai studi terdahulu tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja makro ekonomi dan sosial.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap inflasi

TELAAH PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain birokrasi harus partisipatif, juga harus mampu mendorong terciptanya *good governance*. Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di era desentralisasi merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi karena merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme, arus impor, investasi, tenaga kerja, dan budaya, selain itu dari sisi internal perbaikan pelayanan publik

yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutananya (*demanding community*) (Mardiasmo, 2004).

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Bird and Vaillancourt, 2000):

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*).

3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Bahl (2000) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Ratminto (2003) menyatakan, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan perdagangan bebas peranan administrasi pemerintahan dan perizinan menjadi sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan, karena masyarakat akan menilai baik buruknya otonomi daerah berdasarkan baik buruknya administrasi pemerintahan dan perizinan. Sementara itu era perdagangan bebas dan globalisasi juga menuntut tingkat kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan

yang tinggi, karena administrasi pemerintahan dan perizinan akan mempengaruhi tingkat daya saing daerah dan juga produk-produk daerah, yang pada gilirannya adalah sangat menentukan kinerja keuangan daerah atau negara.

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Abimanyu dan Megantara (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

Bahl (2000) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Todaro (2003) menyampaikan tiga faktor atau komponen utama dalam

pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah : akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata, tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

Menurut Todaro (2003) terdapat adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempengaruhi aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan ketrampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan.

United Nations Development Programme (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(UNDP,1994).

Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2003). Indikator HDI jauh

melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, dan stabilitas harga di daerah. Lokasi/daerah penelitian meliputi semua daerah provinsi di Indonesia (33 provinsi) selama kurun waktu tahun 2008 – 2012.

Untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu dampak desentralisasi terhadap kinerja ekonomi dan stabilitas harga digunakan analisis *multiple regression* yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model estimasi yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$Y1 = \beta_0 + \beta TPD + \beta TK + \mu_1$$

$$Y2 = \delta_0 + \delta_1 TPD + \mu_2$$

Di mana :

Y1 adalah pertumbuhan ekonomi

Y2 adalah inflasi

TPD adalah desentralisasi fiskal

TK adalah tenaga kerja

μ adalah *disturbance term*

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Desentralisasi Fiskal

Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio realisasi total pengeluaran pemerintah daerah provinsi terhadap realisasi total pengeluaran pemerintah pusat.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen.

c. Tenaga Kerja Terserap

Tenaga kerja terserap adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, dalam satuan orang.

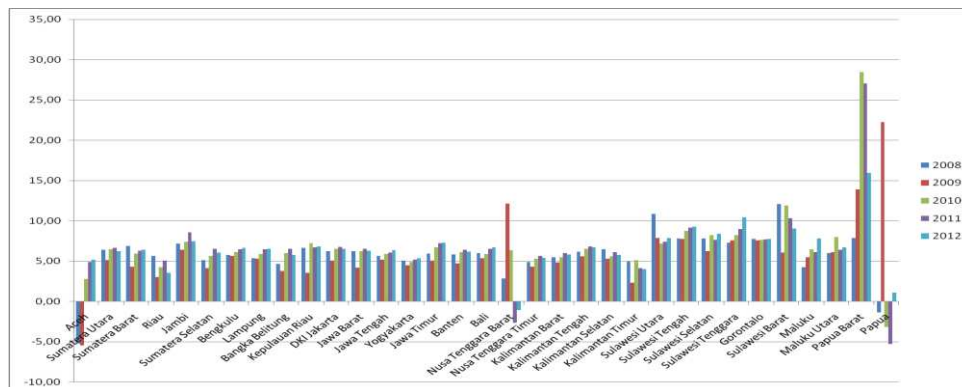
d. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum yang di proksi dengan indeks harga konsumen dengan satuan persen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ekonomi makro yang bisa menggambarkan keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah antara lain Produk domestik regional bruto (PDRB). Ukuran yang dapat dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Gambaran pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di Indonesia lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1 :



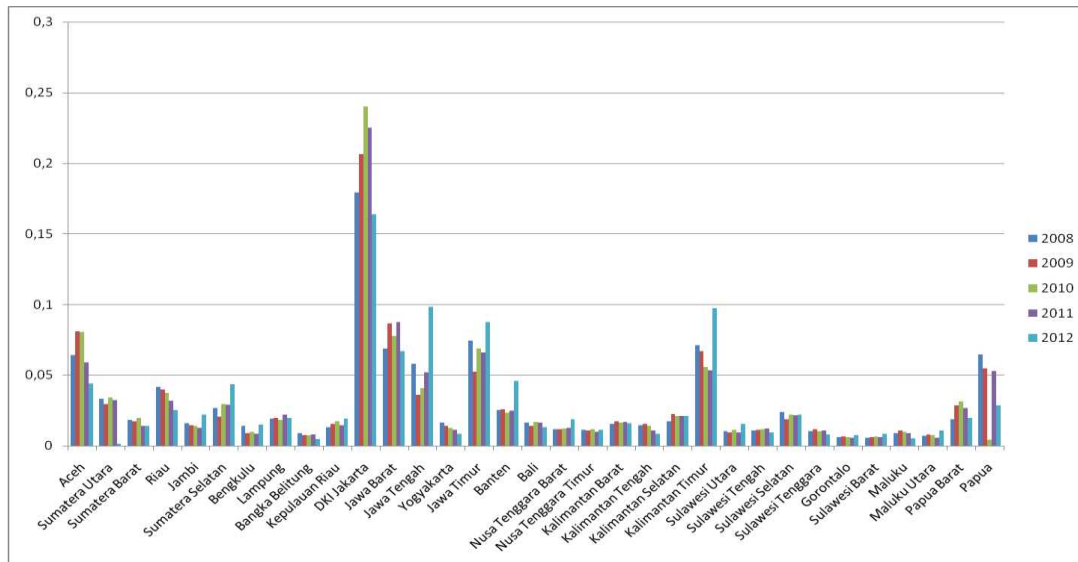
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir kondisi perekonomian makro di Indonesia mengalami fluktuasi. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi di daerah selalu mengalami pertumbuhan positif tetapi masih sangat variatif dan cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat dimana hanya daerah provinsi tertentu saja yang memiliki PDRB tinggi.

Realisasi Pengeluaran Daerah Terhadap Pusat

Kebijakan fiskal pemerintah daerah dapat tercermin dari besaran alokasi

belanja untuk tiap fungsi dan jenis belanja. Belanja ialah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Dalam lima tahun terakhir kondisi fiskal Indonesia meningkat cukup besar, hal ini akan memperkuat pendanaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Gambaran rasio realisasi antara total pengeluaran daerah provinsi dengan pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar 2 :



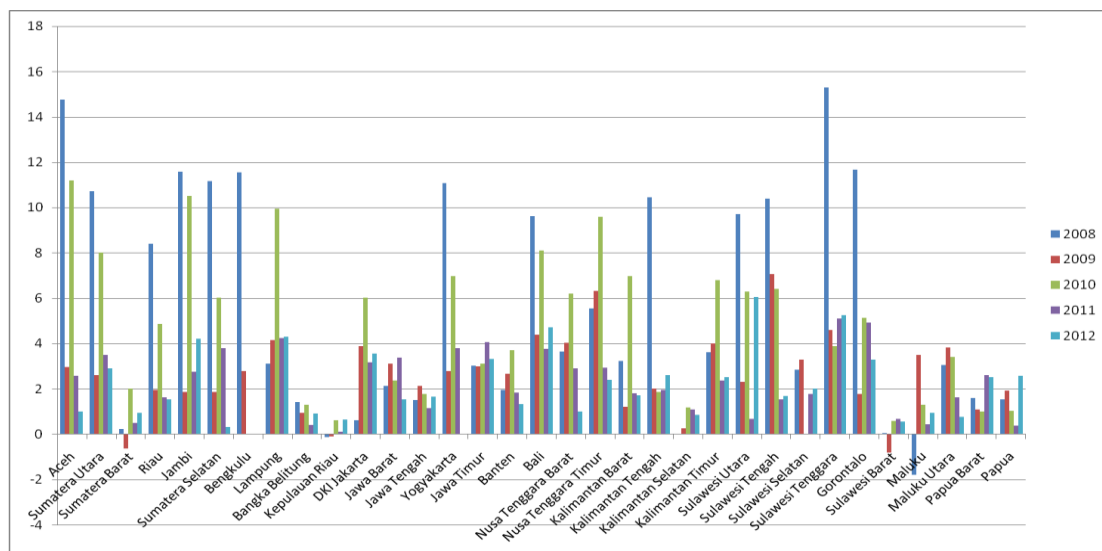
Gambar 2. Rasio Realisasi Pengeluaran Daerah Terhadap Pusat

Seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah alokasi dana tranfer dari pemerintah pusat ke daerah juga meningkat tajam. Kondisi ini meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam mencapai tujuan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Kondisi Inflasi

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan stabilitas

baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Stabilitas di bidang ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh gejolak harga secara umum. Kondisi harga-harga yang rendah dan terkendali menjadi ukuran kinerja makro ekonomi yang baik dan sangat diperlukan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran makro ekonomi. Gambaran stabilitas harga selama lima tahun terakhir di daerah provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 3 :

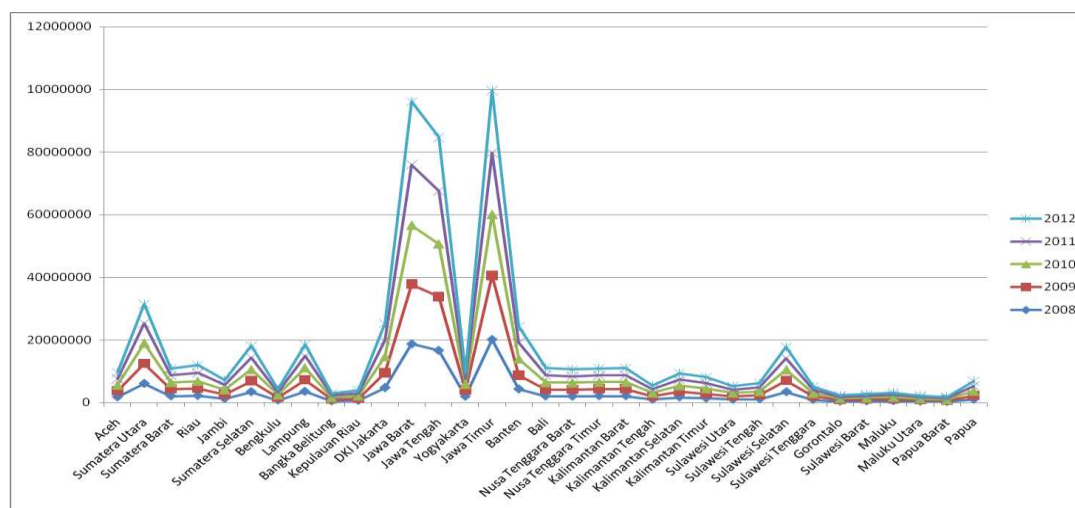


Gambar 3. Inflasi

Secara umum perkembangan inflasi berfluktuasi, puncak pada era desentralisasi terjadi pada tahun 2008, beberapa daerah di Indonesia mengalami inflasi mencapai angka dua digit.

Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan usaha setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang memasuki dunia kerja selalu meningkat. Kondisi angkatan kerja di daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4 :



Gambar 4. Angkatan Kerja

Pembahasan

Setelah dilakukan deteksi asumsi klasik, maka ringkasan hasil estimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil estimasi antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan secara statistik signifikan. Dengan demikian tenaga kerja mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan rendah di daerah harus ditingkatkan kualitasnya

supaya mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang relatif besar di daerah di Indonesia.

Berdasarkan data PDRB daerah-daerah paling besar didominasi oleh sektor industri pengolahan, dimana sebagian industri tersebut adalah industri menengah dan besar yang padat modal, sehingga meskipun *share* terhadap ekonomi besar tetapi penyerapan tenaga kerjanya relatif terbatas. Berdasarkan data tenaga kerja terserap di berbagai daerah, sektor penyerap tenaga kerja masih di dominasi oleh sektor pertanian dan usaha kecil serta sektor informal.

Tabel 2. Hasil Estimasi Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNTK	1.046360	0.370006	2.827953	0.0053
LNTPD	0.227880	0.434692	0.524234	0.6008
C	22.35138	6.573022	3.400472	0.0008
R-squared	0.061832	Mean dependent var		6.329318
Adjusted R-squared	0.050250	S.D. dependent var		3.866058
S.E. of regression	3.767672	Akaike info criterion		5.508806
Sum squared resid	2299.647	Schwarz criterion		5.565278
Log likelihood	-451.4765	Hannan-Quinn criter.		5.531730
F-statistic	5.338488	Durbin-Watson stat		1.124289
Prob(F-statistic)	0.005685			

2. Variabel dependen : Inflasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNTPD	0.042892	0.286238	0.149846	0.8811
C	3.720083	1.153478	3.225102	0.0015
R-squared	0.000138	Mean dependent var		3.551333
Adjusted R-squared	-0.005996	S.D. dependent var		3.196308
S.E. of regression	3.205877	Akaike info criterion		5.179896
Sum squared resid	1675.257	Schwarz criterion		5.217544
Log likelihood	-425.3414	Hannan-Quinn criter.		5.195178
F-statistic	0.022454	Durbin-Watson stat		1.419854
Prob(F-statistic)	0.881071			

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi.

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap inflasi di daerah provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal mempunyai arah positif tetapi secara statistik tidak signifikan terhadap stabilitas ekonomi (inflasi). Hal ini mengandung pengertian bahwa derajat desentralisasi fiskal bukan faktor utama penyebab potensi terjadinya inflasi di daerah.

Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Feltenstein *et all* (2005) menyimpulkan bahwa pergeseran aktifitas fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di China berdampak terhadap inflasi. Hasil penelitian Treisman (2000)

menyimpulkan ada perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang, dimana desentralisasi fiskal berkorelasi dengan rendahnya inflasi untuk negara maju.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Aji, Toni dkk (2009) yang menyimpulkan bahwa dengan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka akan semakin bersifat inflatoir. Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pusat berdampak pada kenaikan *aggregate demand*, tetapi alokasi pengeluaran tersebut tidak langsung untuk belanja barang dan jasa, namun sebagian besar untuk belanja pegawai yang secara langsung berpengaruh pada inflasi (instabilitas ekonomi makro).

Dalam penelitian ini, variabel desentralisasi fiskal menggunakan indikator pengeluaran. Hal ini dikarenakan sisi pengeluaran yaitu belanja riil yang telah dilakukan oleh pemerintah diyakini akan mampu menjelaskan pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan. Selain itu, Malik (2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memungut pajak-pajak strategis dan kemudian mendistribusikannya kepada pemerintah daerah sementara tanggung jawab pengeluaran diberikan kepada pemerintah daerah, maka sisi pengeluaran merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal yang lebih baik dibandingkan dengan sisi pendapatan.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagian besar kewenangan untuk memungut pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya memang dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya akan mendapatkan penerimaannya melalui transfer dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan demikian, fokus derajat desentralisasi fiskal terhadap realisasi total pengeluaran akan menjadi lebih baik.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi di Indonesia (Tabel 4), menunjukkan bahwa desentralisasi

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan desentralisasi fiskal (yang ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio realisasi pengeluaran total daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat) maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting dalam makro ekonomi, karena dari sisi penawaran (*supply side*) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal, dan teknologi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dalam menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab perubahan kesempatan kerja tersebut bukan karena waktu saja, tetapi bisa karena perubahan bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Apabila perekonomian berkembang maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah, sedangkan apabila perekonomian menyusut atau lesu maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebagai akibatnya tentu saja pengangguran akan bertambah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal mempunyai arah positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi di Indonesia tetapi secara statistik tidak signifikan.
2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah . Hasil ini sesuai hipotesis dua yang

menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Provinsi di Indonesia.

3. Desentralisasi fiskal mempunyai arah positif tetapi secara statistik tidak signifikan terhadap inflasi di daerah Provinsi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui: pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (*human development*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada dengan menambah alokasi anggaran (20% dari APBD).
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, BBM, dan sebagainya.
3. Laju inflasi harus selalu diupayakan rendah terkendali supaya tidak

mengganggu kinerja ekonomi makro daerah melalui penyediaan barang dan jasa yang cukup serta meningkatkan tabungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. dan Megantara, A. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Bahl, R. W.,2000. *China : Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Biro Pusat Statistik, 2010. *Pendapatan Regional Jawa Tengah*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Indonesia
- _____,2010. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Indonesia.
- Bird, R. M., and Vaillancourt,F. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Brodjonegoro, B.P.S. 2002. "The impact of decentralization processto the Indonesia regional economies : a simultaneous economic approach. ". *Indonesian Journal of Economics and Development*. Vol.3 No.2 Hal. 25-41. Januari 2003. Jakarta: FE UI.
- Cooper, D.R., and Emory, C.W. 2000. *Business Research Methods*, 5th Richard D. Irwin Inc.
- Demartoto, A. 2007. "Perilaku Korupsi di Era Otonomi daerah. *Spirit Publik*, Vol 3 No.2, pp. 89-102

- Desti, Y. 2006. "Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea", *Journal of Developing*
- Deputi Bidang Politik, Pertahanan Dan Keamanan. Direktorat Aparatur Negara. 2004. *Pelayanan Publik Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik Jakarta: Info Kajian Bapenas*
- Hastuti, E.S dan Haryanto, J. T. 2007. "Studi Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. No.1 Juni 2007.
- Farah Dewi, S. N., "Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan, Investasi Domestik dan FDP", Tesis, Program Pasca Saigana UI, Depok 2002.
- Ferdinand, A. 2005. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. edisi 3. Semarang : BP UNIDIP.
- Goolsarran, Swatantra Anand, 2006. "Corruption: Its Nature, Causes, and Effects Suggestion on the Way Forward", *The Journal of Government Finacial Management*, Vol.55 (1), pp.60-64
- Hair, J, F., Anderson, R. E., Tatham R. L., Black, W.C. 1995. *Multivariate Data Analysis With Reading*, New Jersey : Preactice Hal International
- Handayanto, J. 2003. *Membagi Kinerja Birokrasi Dalam Era Desentralisasi*. Surabaya: FE UNESSA
- Kalla, J. 2003. "Langkah Nyata Memperbaiki Mutu Pelayanan Publik". *Jurnal Forum Inovasi, PPS-PSIA Fisip UI*, Vol 8, September 2003.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kartono, K. 2005. *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Klitgaard. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia.
- Kumorotomo, W., 2008. *Desentralisasi Fiskal : Politik dan Perubahan Kebijakan 1994-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____ 2009. "Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi". *Simposium Nasional 2009*. Yogyakarta, 28 Februari 2009.
- Mahi, R., 2001. *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi*. *Analisa CSIS XXIX*, Hal. 54-66, Jakarta : Indonesia Project, Jakarta.
- Malik, S., Hasan, M., Husein, S. 2006. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan*, *The Pakistan Development Review*, 45(4), pp. 845-854
- Mankiw, N. G., 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Nugroho, R., 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo:
- Pigou, A.C M.A., 1960. *The Economic of Welfare*. Fourth Edition,. London; Mac Millan & CO LTD.
- Pujiati, A. 2007. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi

- Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.12 No. 2 Hal. 134-293, Semarang.: STIE Stikubank.
- Purwandi. 2000. *Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sleman Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah*, Yogyakarta: Andi.
- Ratminto. 2003. *Kinerja Administrasi Pemerintah Di Bidang Perizinan*. Semarang : FISIP UNDIP
- Rachbini, D. J., 2010. *Kolusi Pengusaha-Pengusaha*, Kompas, Selasa 16 Januari 2010.
- Salvator,B. and Strobl,E. 2006. "The Effect on Income Distribution of Development, the Growth Rate and Economic Strategy". *Journal of Development Economic* Vol.XX, Page.55-65.
- Sasana, H. 2003. Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Media Ekonomi dan Bisnis*, Semarang: FE UNDIP
- 2005. "Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan di DIY", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.12 No. 2 Hal. 134-293, Semarang.: STIE Stikubank.
- 2008. pengaruh penyediaan pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Sragen Indonesia dalam era otonomi daerah" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.Semarang: STIE Stikubank.
- 2009. "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap kesejahteraan di Kab./Kota di Jawa Tengah" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Semarang: FE UNTAG
- 2009. "Analisis Dampak desentralisasi Fiskal Thd. Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja di Kab./Kota di Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Semarang: FE UNDIP
- 2009. Pengaruh Layanan Umum Pada Sektor Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah di Kota Semarang
- 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Daerah provinsi Indonesia" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 10 (1), pp. 103-124. Surakarta: FE UMS.
- 2010. "Pengaruh Layanan Umum Pada Sektor Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah di Kota Semarang", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Semarang : STIE Stikubank
- 2011. "Analisis determinan belanja daerah di daerah provinsi Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal." *Jurnal EKSIS*. Jambi: FE UNBARI.
- Strauss, J., Beegle,K., Dwianto,A., Herawati,Y., Pattinasarany, D., Setiawan,E., Sikoki,B. Sukamdi, dan Witular,F. 2002. *Indonesian Living Standards Three Years After The Crisis : Evidence From The Indonesia Family Life Survey*, Laporan penelitian yang dibiayai oleh Partnership on Economic growth (PEG)-Usaid dan World Bank, Yogyakarta.
- Supriadi, A. *Reformasi Birokrasi Dan Perbaikan Pelayanan Publik Dalam Paradigma Administrasi Negara Dan Peningkatan*

- Pofesionalisme Aparatur.*
Semarang : Dialogue. JIKAP
- Tjiptono, F. 1997. *Startegi Pemasaran., Penetuan Audit*: Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- UNDP,1994. *Human Development Report*.
New York : Oxford University Press
- Vazquez, M Jorge dan McNab M Robert, 2006. *Fiscal Desentralization & Economic Growth, Working Paper, Andrew Young School of Policy Studies*, Georgia State University.
- Waluyo, J., (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*, Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI – Depok.
- Whithaker, William H. and Ronald C.Federico, 1997. *Social welfare in Today's World*, Second Edition. New York : The McGraw-Hill Companies.
- Widjaja Brata, Safaat and Nicholas M Zacchea, 2004,"International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle Corruption", *The Joournal of Government Finacial Management*, Vol.53 No.3
- Zuhro, R. S. 2011. "Quo Vadis" Otonomi Daerah? *Harian Kompas*, Selasa 26 April 2011